



***Best Practice Inovasi Pelayanan Publik  
"Laboratorium Kemiskinan" di Kabupaten Pekalongan***

***Public Service Innovation Best Practice "Poverty Laboratory"  
in Pekalongan Regency***

**Kurniani Wismaningsih, Retno Sunu Astuti,**

**Ida Hayu Dwimawanti, Budi Puspo Priyadi, & Teuku Afrizal\***

Departemen Administrasi Publik, Fisip, Universitas Diponegoro, Semarang

Diterima: 05 Desember 2019; Direview: 14 April 2020; Disetujui: 30 April 2020

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti best practice inovasi pelayanan publik "Laboratorium Kemiskinan" sebagai suatu cara yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu kegiatan dengan suatu prosedur tertentu yang dapat diulangi dan bermanfaat untuk dilaksanakan. Berdasarkan proxy-proxy best practice yang telah ditawarkan oleh Prasjo pada 2007 yakni dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan bisa ditransfer ke daerah lain, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mendapati bahwa Laboratorium Kemiskinan sudah memenuhi kriteria-kriteria best practice. Dengan Laboratorium Kemiskinan dua dari tiga desa model telah keluar dari kategori desa merah. Laboratorium Kemiskinan berhasil meraih Penghargaan sebagai TOP 45 Inovasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2020 atau yang lebih dikenal dengan SINOVIK. Prestasi-prestasi ini harus terus dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, namun dalam pelaksanaannya perlu disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Laboratorium Kemiskinan yang di dalamnya memuat antara lain rincian jumlah dana yang dibutuhkan di setiap desa model dan apa saja bentuk dukungan pemerintah desa dalam program ini.

**Kata kunci:** Pengentasan Kemiskinan; Inovasi Pelayanan Publik; *Best Practice*; Program Laboratorium Kemiskinan

**Abstract**

*This study aims to examine the best practice of public service innovation "Poverty Laboratory" as an effective and efficient way of completing an activity with a specific, repeatable and useful procedure to implement. Based on the best practice proxies offered by Prasjo in 2007, namely impact, partnership, sustainability, leadership, and transferability to other areas, the research used a descriptive qualitative approach. This research was conducted in Pekalongan Regency. Collecting data using interviews, observation and documentation. The results of the study found that the Poverty Laboratory had met the best practice criteria. With the Poverty Laboratory two of the three model villages have left the category of red villages. The Poverty Laboratory won the award for TOP 45 Innovation in the 2020 National Level Public Service Innovation Competition or better known as SINOVIK. Pekalongan District Government must maintain these achievements, however, in its implementation, a Poverty Laboratory Development Technical Guideline should be prepared which contains, among other things, the details of the amount of funds needed in each model village and what forms of village government support in this program.*

**Keywords:** Poverty Alleviation; Public Service Innovation; *Best Practices*; Poverty Laboratory Program

**How to Cite:** Wismaningsih, K. Astuti, R.S. Dwimawanti I.H. Priyadi, B.P., & Afrizal, T., (2020). Best Practice Inovasi Pelayanan Publik "Laboratorium Kemiskinan" Di Kabupaten Pekalongan, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 13(1): 256-263.

\* Corresponding author:

E-mail: [teukurian@lecturer.undip.ac.id](mailto:teukurian@lecturer.undip.ac.id)

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN

Permasalahan utama yang harus dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi yang diukur dari tidak terpenuhinya kebutuhan makan dan bukan makanan sebagai kebutuhan dasar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

**Tabel. 1**  
**Persentase Penduduk Miskin Indonesia**

Tahun	Persentase (%)
2015	11,13
2016	10,70
2017	10,12
2018	9,66
2019	9,22
2021	10,19

Sumber: Data BPS, 2021

Persentase penduduk miskin selama lima tahun terakhir terus menurun. Pada September 2019, persentase penduduk miskin sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin dibanding Maret 2019. Jika dibandingkan September 2018, persentase ini juga menurun hingga 0,44 persen poin. Namun pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Indonesia 0,9% dari tahun 2019. Hal ini merupakan dampak adanya pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor perekonomian di Indonesia.

Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim dan lain-lain. Berbeda dengan MDGs, SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan di semua negara berdasarkan prinsip-prinsip *inclusiveness* dan *no one left behind* dilakukan secara bersama. Hal ini dilakukan dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja),

dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan.

Secara khususnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) mencatat Kabupaten Pekalongan belum terlepas dari permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Kabupaten Pekalongan sebesar 12,90% menurun pada tahun 2017, menjadi sebesar 12,61%. Angka ini berada di bawah provinsi namun masih berada di atas rata-rata nasional. Sementara target tingkat kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 adalah *single digit* (9,02), 2020 sebesar 8,07% dan tahun 2021 sebesar 7,10%.

Hasil evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan selama ini masih bersifat *business as usual*, eksklusif sentralistik, dan kurang inovatif. Kebijakan pengentasan kemiskinan selama ini juga tidak berbasis data dan masalah yang jelas. Hal-hal inilah yang mendasari dibutuhkannya langkah inovatif untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut.

Desa/Kelurahan di Kabupaten Pekalongan berjumlah 285 terbentang di daerah pesisir, perkotaan dan pegunungan. Pada masing-masing tipologi tersebut kemiskinan terjadi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Desa pesisir sebagian

masyarakatnya berpenghidupan dari sumber laut, masyarakat desa di perkotaan menggantungkan hidupnya dari sektor industri dan jasa, sedangkan masyarakat desa pegunungan dari hasil pertanian.

Tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) 2015 bahwa kemiskinan di Kabupaten Pekalongan terpetakan menjadi 67 desa merah, 119 desa kuning dan 99 desa hijau. Dari BDT tersebut juga diketahui indikator kemiskinan dan jumlah kemiskinan di tiap desa.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melahirkan Laboratorium Kemiskinan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu, tepat program, tepat sasaran serta tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga miskin. Laboratorium Kemiskinan merupakan sebuah inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Inovasi ini dilakukan dengan cara membuat tiga desa model yang mewakili tipe topografi wilayah Kabupaten Pekalongan. Tiga desa model tersebut adalah: 1) Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto, mewakili desa pesisir pantai; 2) Desa Kertijayan Kecamatan Buaran, mewakili desa di wilayah perkotaan; 3) Desa Botosari Kecamatan Paninggaran, mewakili desa pegunungan.

Penanganan kemiskinan untuk tiap topografi memiliki perbedaan. Hal tersebut dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, membangun serta mengembangkan potensi dan Sumber Daya Alam desa merah, agar menjadi desa kuning dan desa hijau. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik adalah “terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.”

Dari pengertian di atas, inovasi pelayanan publik tidak harus sesuatu yang baru, namun

bisa merupakan modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang sudah ada.

Sangkala (2013) menyatakan bahwa inovasi dalam manajemen sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai pengembangan desain kebijakan baru dan standar operasi baru yang dihasilkan oleh organisasi yang ditujukan kepada masalah kebijakan publik sebuah inovasi dalam administrasi publik adalah efektivitas, kreativitas, dan jawaban unik terhadap masalah baru atau jawaban baru terhadap masalah lama. Sebuah inovasi tidaklah harus merupakan solusi yang sempurna atau berupa penyelesaian akhir, tetapi suatu solusi terbuka yang dapat ditransformasi oleh mereka yang mengadopsi (Sirait, 2011; Silalahi et.al., 2019; Rinaldi, 2012; Munawaroh, & Mutiarin, 2019)

Jason Potts dan Tim Kestelle (dalam Rosyadi dan Indiahono, 2020) menuliskan tentang lima alasan pentingnya inovasi sektor publik dalam rangka menyesuaikan perkembangan. “*Pertama*, karena ukuran dari sektor publik yang cenderung besar. Besaran sektor publik dilihat dari besaran anggaran yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dasar. *Kedua*, organisasi sektor publik merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan khusus, yaitu sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk membantu penyediaan pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi sektor publik harus melakukan inovasi guna memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, dengan menerapkan manajemen yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyediaan layanan publik. *Ketiga*, implementasi inovasi dalam pelayanan sektor publik harus diikuti dengan penerapan standar mutu yang jelas, supaya ada tolok ukur dan alat evaluasi yang jelas. Kontrol tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan mengambil contoh pada ‘*best practice*’, yang telah dilaksanakan di lembaga lain. *Keempat*, akibat adanya ekonomi dan teknologi yang terus berkembang, maka penyesuaian kebijakan yang terkait dengan inovasi pada sektor publik (Pelikan & Wegner 2003). Inovasi pada sektor publik akan menjadi dorongan pula bagi sektor privat untuk melakukan inovasi. Apabila tidak ada inovasi dalam sektor publik, maka akan menjadi

penghambat bagi inovasi sektor privat. *Kelima*, adanya tuntutan sistem manajemen yang kolaboratif, yaitu pentingnya keterlibatan sektor privat dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan sektor publik, maka kebijakan sistem inovasi sektor publik juga harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.”

Sampai saat ini masih minim penjelasan secara ilmiah terkait definisi ataupun sesuatu hal yang berkaitan langsung dengan *best practice*, karena pada dasarnya *best practice* dianggap hanyalah sebuah predikat yang diberikan terhadap indikator-indikator yang tidak dapat digeneralisasikan ke setiap aspek yang ada. *Best practice* diartikan sebagai sebuah ide atau cara yang digunakan dan dianggap berhasil dan memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi (Pertwi, 2012). *Best practice* merupakan praktek terbaik yang dilakukan oleh sebuah otoritas yang biasanya ada di dalam Pemerintah atau perusahaan, tergantung kondisinya. *Best practice* juga menjadi suatu contoh untuk dapat ditiru dan dipraktekkan di tempat yang lain. (Ikhwan et.al., 2020; Nasution et.al., 2019; Eldo, 2018; Khainuddin, 2019; Harahap et.al., 2020).

Manajemen Perubahan (*change management*), untuk mengatasi permasalahan organisasi dan kultur hanya dilakukan dengan baik dengan dukungan kepemimpinan yang kuat. Tantangan organisasi dan kultural, umumnya lebih sulit diselesaikan daripada tantangan dari sisi teknologi (Pamungkas, 2019; Samsara, 2013).

Prasojo et.al (2007) pernah mengutip penilaian UN Habitat tentang *best practice* dalam konteks lingkungan Perkotaan sebagai inisiatif yang telah menghasilkan kontribusi yang lebih daripada yang lainnya (*outstanding contributions*) dalam meningkatkan kualitas kehidupan baik di kota-kota maupun masyarakat umum lainnya. Secara umum UN juga telah menggambarkan melalui beberapa poin utama yang harus dipenuhi, antara lain : 1) Memiliki dampak yang dapat ditunjukkan dan diperkenalkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 2) Merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat pada umumnya; 3) Berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

UN juga telah telah memberikat batasan-batasan yang tertuang dalam kriteria untuk

dijadikan alat ukur dalam mengimplementasikan program *best practice*, kriteria-kriteria tersebut antara lain yang telah ditulis oleh Prasojo (2007): a) Dampak (*impact*), Sebuah *best practice* harus menunjukkan sebuah dampak langsung yang positif dan dapat dilihat serta dirasakan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapatkan hak-haknya; b) Kemitraan (*Partnership*), Sebuah *best practice* harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor serta stakeholder yang terlibat di dalamnya. Setidaknya ada melibatkan 2 pihak yang saling berintegrasi; c) Keberlanjutan (*Sustainability*). Sebuah *best practice* harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan legislasi, kebijakan sosial, kerangka institusional, serta efisiensi, transparan, dan manajemen yang akuntabel; d) Kepemimpinan (*Leadership*). *Best practice* harus digerakkan dengan gaya kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan, termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik yang diambilnya; e) Transfer ke daerah lain (*Transferability*). Setiap daerah yang melakukan inovasi sudah pasti harapannya mendapatkan dampak positif bagi daerahnya. Hal tersebut dapat menjadi *lesson-learned* atau pembelajaran bagi daerah lainnya sehingga penerapannya dapat dicontoh dan dijalankan di daerah tersebut tentunya dengan segala jenis pertimbangan dan penyesuaian dengan konteks lokalnya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Inovasi Pelayanan Publik “Laboratorium Kemiskinan” sebagai *best practice* dengan analisis menggunakan konsep *best practice* yang sudah pernah dikenalkan oleh UN Habitat. Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat menambah referensi Pemerintah Daerah terkait dengan inovasi pelayanan publik ataupun mengadopsi inovasi pelayanan ini untuk diterapkan di daerahnya masing-masing.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor, 1990 dalam

Sugiyono 2013). Penelitian ini dilaksanakan Kabupaten Pekalongan. Lokasi ini dipilih sebagai tempat atau lokus penelitian dengan pertimbangan kabupaten ini memiliki inovasi pelayanan publik pengentasan kemiskinan yang telah mendapatkan penghargaan TOP 45 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional atau SINOVIK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Sumber data dibagi menjadi, 1) Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini terutama diperoleh dengan melalui pengamatan dan wawancara sehingga untuk memperoleh jawaban dari responden maupun informan yang nyata dan sesuai fokus penelitian. 2) Data Sekunder antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi, Menurut Moleong (2017) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. Observasi dilakukan secara langsung ke lapangan mengetahui dan mengamati Bagaimana Pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. 2) Wawancara, proses ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, selaku pengampu Laboratorium Kemiskinan. 3) Studi Dokumen, Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.

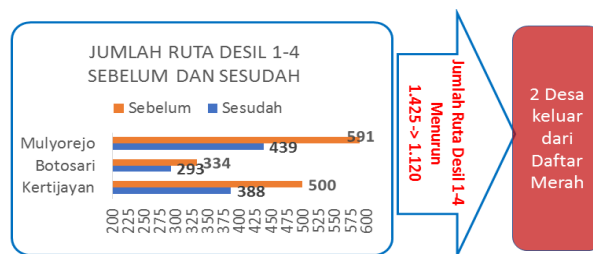
Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Analisis data proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dikembangkan guna mencari makna dan maksud dari hasil penelitian. Semua data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis serta diklarifikasi atau diurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga muncul data yang relevan dengan permasalahan penelitian dan disajikan secara deskriptif serta dianalisis secara kualitatif, analisis data secara kualitatif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

secara mendalam dari suatu gejala sosial tertentu (Moleong, 2017).

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2017). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability* (Sugiyono, 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak (Impact)



Gambar 1  
Jumlah Rumah Tangga Desil 1-4 Sebelum dan Sesudah Laboratorium Kemiskinan  
Sumber: Data BAPPEDA LITBANG KAB. Pekalongan, 2020

Dampak dari Laboratorium Kemiskinan adalah keluarnya dua desa (Desa Mulyorejo dan Desa Botosari) dari tiga desa model dari daftar merah. Hal ini didukung dengan pencapaian target-target Laboratorium Kemiskinan pada tiga desa model, yaitu 1) Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni sebesar 75,28%; 2) Meningkatnya akses rumah tangga miskin ke air bersih sebesar 82%; 3) Meningkatnya akses rumah tangga miskin ke jamban sebesar 23,35%; 4) Jumlah penduduk dengan penyakit kronis yang tertangani melalui pendekatan PIS-PK meningkat sebesar 68,91%; 5) Penduduk dengan kecacatan yang tertangani bertambah sebesar 30,35%; 6) Berkurangnya Anak Tidak Bersekolah sebanyak 5,55% melalui program "KUDU SEKOLAH"; 6) Lima puluh lima koma tiga persen (55,30%) penduduk desa pilot usia 15-59 tahun telah mengikuti peningkatan ketrampilan, pengetahuan dan bekal bekerja, dan 7) Jumlah rumah tangga pada desil 1 - 4

menurun dari 1.425 rumah tangga menjadi 1.382 rumah tangga.

### **Kemitraan (*Partnership*)**

Laboratorium Kemiskinan mengusung konsep *Pentahelix* yaitu kolaborasi antara Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Pekalongan hingga Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat peduli dan media. Keterlibatan semua pihak sudah dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan alokasi APBD mensinergikan sumber daya pada Perangkat Daerah melalui program kegiatan yang difokuskan pada tiga desa Laboratorium Kemiskinan. Pemerintah Desa dengan assistensi dari TKPKD menyusun perencanaan dan penganggaran desa yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan. Sementara Dunia usaha melalui forum CSR berpartisipasi aktif dalam mendukung pendanaan Laboratorium Kemiskinan, Perguruan Tinggi dengan Program Universitas Membangun Desa baik KKN Tematik maupun desa binaan sudah didesain sejak awal penerjunan mahasiswa melalui konsep Tri Dharma. Sedangkan kelompok masyarakat peduli baik secara individu maupun kelembagaan baik di tingkat kabupaten maupun desa berpartisipasi secara aktif melalui program kegiatan yang ada di masing-masing organisasi kemasyarakatan.

Sebagai perwujudan menempatkan si miskin sebagai subyek dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka penduduk setempat dan si miskin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui *Participatory Poverty Assessment* (PPA) pada tiga desa tersebut. Langkah ini secara riil telah menumbuhkan kepedulian terhadap warga kurang mampu melalui bantuan kebutuhan hidup sehari-hari sebelum mendapatkan penanganan dari pemerintah lebih lanjut.

### **Keberlanjutan (*Sustainability*)**

Laboratorium kemiskinan telah berhasil menarik peran serta berbagai pihak yang terkait terutama pihak di luar pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut mempunyai kepedulian sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini

berhasil memberi dampak positif sosial yang nyata dan meningkatkan produktivitas penduduk setempat.

Intervensi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat dievaluasi secara berkala untuk mengetahui seberapa besar dampak dan keefektifannya. Evaluasi ini dilakukan agar anggaran yang berasal dari semua pihak dalam pelaksanaan intervensi tersebut tepat sasaran dan tidak sia-sia. Laporan pelaksanaan intervensi dengan dana bersumber dari pihak di luar pemerintahan dilaporkan kepada yang bersangkutan agar pihak tersebut mengetahui hasilnya. Dengan harapan pihak tersebut akan terus memberikan dukungan dalam program ini.

Penanganan infrastruktur dasar seperti hunian, air bersih, sanitasi dan jamban yang dilaksanakan dalam program Laboratorium Kemiskinan mampu memperbaiki kondisi lingkungan desa pilot. Hasil-hasil tersebut di atas dapat mengurangi resiko penolakan terhadap inovasi ini sehingga keberlanjutan program dapat terjaga.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menjaga kepedulian sosial dan antusiasme pihak di luar pemerintah untuk ikut serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan agar tetap tinggi dan keberlanjutan. Dengan demikian program Laboratorium Kemiskinan ini akan tetap berlanjut. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melibatkan pihak di luar pemerintah dalam proses perencanaan program Laboratorium Kemiskinan serta memberikan apresiasi pada pihak-pihak tersebut atas peran serta mereka dalam program ini.

### **Kepemimpinan (*Leadership*)**

Inovasi Laboratorium Kemiskinan yang digagas oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, telah berhasil lolos sebagai TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang lebih dikenal dengan SINOVIK. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional ini merupakan ajang kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan rutin setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia.

Dengan prestasi ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapatkan

penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 7,71 Milyar. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan inovasi pemenang sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang petunjuk penggunaan DID alokasi Inovasi Pelayanan Publik.

### Transfer ke Daerah Lain (*Transferbility*)

Laboratorium Kemiskinan mempunyai potensi besar untuk diterapkan ke wilayah lain. Potensi ini dapat diketahui dimana saat ini sedang dilaksanakan replikasi di 6 desa lain di Kabupaten Pekalongan. Di tingkat provinsi, pada akhir 2019 Kabupaten Pekalongan berkesempatan menyampaikan *sharing best practice* penanggulangan kemiskinan pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dari sisi program, memberikan inspirasi bagi lahirnya Gerakan *Kudu Sekolah* yang telah dicanangkan pada 2 Mei 2019 guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), konsep desa binaan tematik bagi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan konsep Universitas Membangun Desa, Program Kampung Berkah Emas Baznas Kabupaten dan yang lebih penting inovasi ini mampu mendorong Perangkat Daerah terkait untuk lebih serius dalam menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran.

### SIMPULAN

Laboratorium kemiskinan adalah inovasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kebaruan (*novelty*) program ini adalah pelibatan semua pihak (*Pentahelix*). Hal ini berbeda dengan program pengentasan kemiskinan yang ada sebelumnya yang cenderung sporadis dan parsial. Laboratorium Kemiskinan dilaksanakan dengan mengambil tiga desa model yang mewakili tiga topografi wilayah Kabupaten Pekalongan, yaitu desa wilayah pesisir, desa wilayah perkotaan dan desa wilayah pegunungan. Setiap desa model mendapatkan intervensi yang berbeda berdasarkan karakteristik desa dan kemiskinan yang terjadi. Laboratorium Kemiskinan telah memberikan hasil yang signifikan dengan keluarnya dua desa model dari desa merah. Laboratorium Kemiskinan merupakan *best*

*practice* Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pengentasan kemiskinan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Eldo, D.H.A.P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 100-109
- Harahap, A., Siregar, N., & Kadir, A. (2020). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Koperasi Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 79-88.
- Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persepsi-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Ikhwan, M., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 103-110. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.204>
- Khainuddin, K., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Rawat Inap Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 22-31.
- Moleong, J.L. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh, S. & Mutiarin, D (2019). Implementasi Program “Keluar Bersama” dalam Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7 (2): 122-131
- Nasution, E.D., Thamrin, M.H. & Dewi, R. (2019). Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Samsat Medan Selatan Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 26-31.
- Pamungkas, L.D., dan Fitriati, R. (2019). Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kudus. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

- Pertiwi, R. (2012). Analisis Best Practice Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klitithikan Notoharjo Kota Surakarta). Universitas Indonesia.
- Prasojo, E., Kurniawan, T., dan Hasan, A., (2007). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen. Jakarta: Yappika.
- Rinaldi, R., (2012), Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara), *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 1 (1): 22- 34
- Rosyadi, S., dan Indoahono, D., (2020). Adminitrasi Publik New Normal. Banyumas: SIP Publishing.
- Samsara, L., (2013). Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi (Studi tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik* 1(1), 10-19.
- Sangkala. (2013). Innovative Governance: Konsep dan Aplikasi. Surabaya: Capiya Publishing.
- Silalahi. A.F.L, Syafruddin, R. & Beby, M.B. (2019). Kualitas Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 8-14
- Sirait, R.S.M.P., (2011), Analisis Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran (Studi Pada Dinas Kependudukan Kota Medan), *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 1 (2): 232-249
- Stamboel, K. A. (2012). Panggilan Keberpihakan: Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.